

UNITED STATES AND IRAN INTERVENTION IN THE POST-ARAB SPRING CONFLICT IN YEMEN

Ahmad Zainal Mustofa^{1,3}
Magdy B. Behman^{2,3}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²Eastern Mennonite University, Virginia, United States of America

³E-mail: m.ahmadzainal@gmail.com, mbbehman@gmail.com

Abstract

This paper describes the role of the United States and Iran in the conflict occurring in Yemen after the Arab Spring. The dispute arose due to political turmoil between the government and the opposition, with America supporting the ruling regime and its ally, Saudi Arabia. In the opposition camp, Iran supported the Houthi group with the same ideology, namely Shi'ah. This research was conducted to answer the question of the interests of the United States and Iran in the proxy war in Yemen. The theory used in this study is the concept of national interest. This concept is closely tied to realism's viewpoint in international affairs. The research method used is descriptive-analytical by analyzing the relevant variables from various sources that have been selected according to research objectives. The results showed that the role of the United States and Iran in the Yemen conflict could be seen through four lenses of national interest: defense interests, economic interests, world order interests, and ideological interests. Of these four interests, the US and Iran aimed to show their supremacy, presence, strength, and influence in global politics of eyes world by intervening in the Yemen conflict in the post-Arab Spring.

Keywords: Conflict, National Interest, Intervention, the Arab Spring

الملخص

تصف هذه المقالة تورط الولايات المتحدة وإيران في الصراع الذي حدث في اليمن بعد الربيع العربي. ووقع الصراع بسبب الاضطرابات السياسية بين الحكومة والمعارضة، حيث كانت الولايات المتحدة داعمة لنظام الحكم وحليفه، أي المملكة العربية السعودية. وأما في المعارضة، قدمت إيران دعمها لجماعة الحوثيين ذات نفس الأيديولوجية، أي الشيعة. أجري هذا البحث للإجابة على سؤال، ما هي أهمية الولايات المتحدة وإيران في الحرب بالوكالة في اليمن؟ النظرية المستخدمة في هذا البحث هي مفهوم الأهمية الوطنية. يرتبط هذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بوجهة نظر الواقعية في العلاقات الدولية. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة وصفية تحليلية من خلال تحليل المتغيرات ذات الصلة من مختلف المصادر التي تم اختيارها وفقاً لاحتياجات البحث. بعد إجراء البحث، يمكن استنتاج أن تورط الولايات المتحدة وإيران في الصراع اليمني، يمكن رؤيته من أربعة عوامل للمصالح الوطنية، وهي المصالح الدفاعية، والمصالح الاقتصادية، ومصالح النظام العالمية، والمصالح الأيديولوجية. ومن هذه المصالح الأربعة، تريد الولايات المتحدة وإيران إظهار هيمنتها ووجودهما وقوتها وتأثيرهما في السياسة العالمية في عيون العالم من خلال التدخل في الصراع اليمني بعد الربيع العربي.

الكلمات المفتاحية: الصراع، الأهمية الوطنية، التدخل، الربيع العربي.

PENDAHULUAN

Musim Semi Arab atau *Arab Spring* yang melanda kawasan Timur Tengah merupakan pergerakan sosial yang memiliki dampak besar pada negara-negara Arab selama dua puluh tahun terakhir. Tidak terkecuali dengan perang saudara yang terjadi di Yaman. Yaman telah mengalami perang saudara yang panjang atau polarisasi yang ada dalam internal mereka pasca munculnya *Arab Spring* (Guzansky, 2012, p. 1). Destabilisasi ini muncul akibat kediktatoran pemerintah yang didukung oleh Amerika Serikat. Pemerintah saat itu - khususnya presiden Yaman, Saleh - melakukan korupsi uang mencapai 60 miliar dollar AS, padahal Yaman mengalami kemiskinan selama 33 tahun kekuasaannya. Ia juga tidak enggan untuk membalas dendam pada orang yang memaksanya turun dari kekuasaan (studies.aljazeera.net, 2017). Kepemimpinan yang telah melukai masyarakat selama bertahun-tahun inilah yang menjadi pemicu konflik Yaman.

Pada Januari dan Februari 2011, sejumlah aktivis politik dan pemuda di Yaman yang sebelumnya tidak puas dengan pemerintahan Ali Abdullah Saleh turun ke jalan-jalan Sanaa dan Taiz untuk menyerukan jatuhnya rezim yang telah 33 tahun berkuasa. Demonstrasi yang dilakukan terinspirasi oleh peristiwa gejolak politik yang terjadi di Mesir dan Tunisia. Pada akhir Februari, baik Houthi dan Gerakan Selatan, yang tersinggung terhadap pengelompokan akar rumput, menyerukan kembalinya otonomi kepada selatan yang sebelumnya merdeka dan telah menyatakan dukungannya. Houthi dan Gerakan Selatan kemudian bergabung dengan JMP (*Joint Meeting Parties*) yang merupakan rapat gabungan dari koalisi partai oposisi termasuk faksi-faksi kiri utama Yaman dan partai *Islah Islam*, kemudian sejumlah pembelot dari rezim itu sendiri, mulai dari reformis kubu presiden, tokoh-tokoh suku utama hingga para pemimpin militer. Bagi banyak orang Yaman, kisruh antar elit terjadi karena tuntutan rakyat tentang legitimasi revolusi

dilanggar oleh rezim. Pemberontakan Yaman telah menyatukan sejumlah faksi-faksi yang berbeda dengan tujuan akhir melawan rezim Saleh (Baron, 2015, p. 2).

Revolusi Yaman semakin melemahkan pusat pemerintah dan menghasilkan peningkatan pengaruh Iran dan al-Qaeda. Revolusi Yaman telah mendorong Iran untuk meningkatkan dukungan politik dan militernya sebagai elemen oposisi di Yaman, pertama dan terutama pemberontak Syiah Houthi. Di antara kelompok Yaman yang menerima dukungan Iran, ruang lingkup bantuan militer untuk Syiah adalah yang paling signifikan, termasuk aktivitas oleh Pengawal Revolusi Iran dan tidak menutup kemungkinan bantuan dari Hizbullah. Mirip dengan keterlibatannya di Irak, Lebanon, dan sebagian kecil di Jalur Gaza, Iran memanfaatkan kekuatannya di Yaman (Guzansky, 2012, p. 1). Melihat peluang tersebut, Iran tidak tinggal diam dalam mengatur siasat untuk memperkuat basis pertahanan mereka. Terlebih, dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah sangat kuat dalam aspek pertahanan mereka. Iran mencoba memanfaatkan Yaman sebagai jalur untuk memasok senjata terhadap aliansinya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang apa kepentingan Amerika Serikat dan Iran dalam mengintervensi konflik di Yaman? Penelitian ini akan menguraikan tentang motif kepentingan kedua negara dalam melakukan intervensi terhadap konflik yang terjadi di Yaman. Intervensi tersebut karena adanya kepentingan nasional dari AS-Iran terhadap Yaman dengan memanfaatkan situasi konflik tersebut.

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan salah satu aspek penting dari proses penentuan kebijakan suatu negara. Konsep kepentingan nasional sangat berkaitan dengan pandangan realisme dalam hubungan internasional. Dalam konsep ini, aspek keamanan menjadi tujuan utama negara (Dermawan, p. 32). Menurut Mustofa (2021), kepentingan nasional menjadi model politik yang memiliki tujuan utama untuk memberikan keuntungan maksimal bagi negaranya. Donald E. Nuechterlein,

mengungkapkan bahwasanya konsep kepentingan nasional suatu negara tidak terlepas dari empat aspek utama, yaitu: Kepentingan Pertahanan, Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Tatanan Dunia dan Kepentingan Ideologis (Nuechterlein, 1976).

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan menghimpun data yang relevan dengan pembahasan terlebih dahulu, setelah itu dianalisis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, maupun laporan penelitian yang kemudian dijadikan sebagai data penelitian. Sedangkan untuk analisis data menggunakan metode studi literatur. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. (Moehnilabib & dkk, 1997, p. 89).

Sumber data primer dalam penelitian ini merujuk pada data yang berkaitan langsung dengan Amerika Serikat dan Iran serta Arab Saudi. Adapun data primer tersebut bisa berupa *website* resmi negara, *white paper*, dll. Sedangkan sumber data sekunder bisa berupa majalah, surat kabar baik cetak maupun online, serta media lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Semua data yang terkumpul akan dilakukan filterisasi untuk memperoleh data-data yang relevan dengan pembahasan. Setelah itu, penulis mengolah data-data pustaka tersebut sebagai bahan penelitian agar menghasilkan hasil analisis yang sesuai dengan pembahasan baik secara substansial maupun esensial.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memaparkan konflik yang terjadi di Yaman, seperti penelitian dari Alvis Rahman dkk, yang berjudul “Perang Saudara di Yaman.” Tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis konflik kepentingan – Arab Saudi dan Houthi- guna mencapai

kesepakatan resolusi konflik (Basuki & dkk, 2019). Kemudian penelitian dari Ahmad Nauval Farras (2020) dengan judul “*Balance of Power* dalam Intervensi Arab Saudi pada Konflik Yaman yang terjadi Pasca *Arab Spring*.” Tujuan dari tulisan ini adalah intervensi yang dilakukan Arab Saudi merupakan upaya untuk menghentikan pengaruh Iran di Timur Tengah. Terdapat juga penelitian dari Adeb Abdulelah Abdulwahid Al-Tamimi dan Uddagatti Venkatesha (2021) yang berjudul “*The Main Factors of Yemeni Conflict: An Analysis*.” Tujuan dari tulisan ini adalah faktor konflik di Yaman tidak hanya merupakan hasil dari masalah keamanan atau politik saja, tetapi juga hasil dari masalah sosial ekonomi serta faktor eksternal yang memengaruhi negara tersebut. Adapun posisi penulis dalam penelitian ini menitikberatkan pada motif Amerika Serikat dan Iran beserta aliansinya dalam melakukan intervensi di Yaman pasca *Arab Spring*.

PEMBAHASAN

Arab Spring di Yaman

Secara literal, *Arab Spring* memiliki makna pemberontakan Arab. Tetapi, dalam beberapa pandangan mengemukakan bahwa *Arab Spring* adalah fenomena kebangkitan dunia Arab atau pemberontakan terhadap rezim otoriter yang dimulai pada bulan Desember 2010 di Tunisia. Sejak tanggal 18 Desember 2010, *Arab Spring* telah terjadi di Tunisia dan Mesir, kemudian perang saudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, Yaman dan Oman. Lalu, gelombang protes di Kuwait, Lebanon Mauritania, Arab Saudi, Sudan dan Sahara Barat (ABM, 2013, pp. 10-11). Gejolak *Arab Spring* bermula dari Tunisia. Pemicunya adalah seorang pemuda berusia 26 tahun bernama Mohamed Bouazizi yang memprotes rezim represif dengan cara membakar diri. Peristiwa ini membangkitkan keberanian rakyat Tunisia untuk melawan rezim Zine El Abidine Ben Ali atau lebih dikenal dengan sebutan Ben Ali. Rakyat Tunisia pun melakukan aksi demonstrasi bersama dengan turun ke jalan sehingga membuat rezim Ben Ali tidak mampu membendung

gelombang massa. Pada akhirnya, Ben Ali memutuskan untuk meninggalkan Tunisia (Sahide, 2019, p. 37). Tunisia menjadi contoh yang kemudian diikuti oleh beberapa negara untuk menjatuhkan rezim penguasa. Pasca lengsernya Ben Ali, kelompok koalisi masyarakat sipil Tunisia mampu menjaga situasi dalam negeri agar tetap stabil sehingga mereka mampu menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pasca merdeka tahun 1956 (Rofii, 2019, p. 286). Jatuhnya Ben Ali dari puncak kekuasaan di Tunisia pada satu sisi memang memberikan harapan baru untuk terlepas dari rezim represif, namun di sisi lain muncul permasalahan dalam negeri di beberapa sektor.

Kemiskinan, kekerasan, kurangnya keamanan pribadi dan korupsi pemerintah adalah beberapa ciri khas Yaman sebelum dimulainya Musim Semi Arab. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan kedaulatan yang efektif dan stabilitas internal dan melekat dalam realitas Yaman, karena menderita dari etnis, agama dan heterogenitas budaya, permusuhan antar daerah dan provinsi, dan membawa struktur hierarki tradisional. Bertahun-tahun lamanya masalah ini diperburuk oleh tindakan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang selama 33 tahun pemerintahannya membudidayakan dan melestarikan sistem politik yang terpecah dan berkonflik untuk menjadikan dirinya sebagai satu-satunya elemen yang mampu mempersatukan negara (Kronenfeld & Guzansky, 2014, p. 80).

Masalah ekonomi Yaman tidak terbatas pada kelangkaan air saja, namun pendapatan negara juga rendah dan sangat bergantung pada sumber daya minyak yang menurun. Sekitar 25% dari PDB-nya didasarkan pada pendapatan minyak, dan jaringan pipa negara itu sering menjadi sasaran serangan teroris. Yaman juga menderita kekurangan pangan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Di negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk 3%, angka pengangguran kaum muda diperkirakan mencapai 33,7%. Tata kelola yang buruk, korupsi, serta ketidakstabilan dan ketidakamanan negara semakin

memperburuk tantangan ekonomi ini. Untuk negara yang tidak stabil seperti itu tentu saja akan menderita kekurangan otoritas pusat yang kuat, sumber daya, dan peluang, ini adalah masalah utama. Hal tersebut merupakan kombinasi dari faktor-faktor yang membuat Yaman menjadi lingkungan yang tidak stabil dan tidak aman yang kemudian memberikan lahan subur bagi radikalisme dan terorisme (Esfandiary & Tabatabai, p. 158).

Sebelum 2011, selain menghadapi risiko keruntuhan ekonomi, Yaman juga dilanda berbagai konflik politik. Sumber utama ketegangan dan kekerasan termasuk kecenderungan separatis yang tumbuh di bekas wilayah Yaman selatan, yang merupakan negara merdeka dari tahun 1967 sampai reunifikasi pada tahun 1990. Sebuah perang saudara yang terjadi terus-menerus di utara Yaman sejak 2004 dengan kelompok Houthi yang merupakan kelompok berideologikan Syiah Zaydi. Pergerakan kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan otonomi yang lebih besar. Secara keseluruhan, Yaman dilanda situasi mengerikan pada tahun 2011. Saat itu, gelombang pemberontakan melanda melalui Timur Tengah dan meluas ke Yaman. Akibatnya, tingkat ketidakstabilan negara semakin tinggi dan kekerasan mencapai tingkatan baru yang mengancam negara menuju kehancuran. Kesepakatan di antara elit negara yang terpecah pada akhir 2011 menyebabkan pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh dan muncul untuk menghentikan kekerasan. Namun tak satu pun dari banyak masalah yang terjadi di Yaman terselesaikan. Akibatnya, ketidakstabilan yang berkepanjangan tetap menjadi skenario yang paling mungkin terjadi di Yaman (Juneau, 2013, p. 409).

Ketidakstabilan politik di Yaman sebelum tahun 2011 bukanlah hal baru. Konstitusi negara modern Yaman yang muncul setelah penyatuan *Yemen Arab Republic* (YAR) pada tahun 1990 dan *People's Democratic Republic of Yemen* (PDRY) meresmikan sistem politik multipartai dengan jaminan hak memilih dan pencalonan untuk semua warga Yaman, persamaan di depan hukum, dan independensi peradilan. Meski ada partai

oposisi, tidak ada tantangan nyata terhadap kekuasaan yang mengakar baik yang dikeluarkan oleh rezim tersebut terhadap partai mapan atau sektor non-pemerintah (Durac, 2012, pp. 163-164).

Tindakan Saleh yang telah berkuasa bertahun-tahun tentu membuat banyak celah yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkannya. Terlepas dari sikapnya yang represif terhadap minoritas Syiah Zaydi, Saleh telah gagal dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi rakyat Yaman. Kegagalannya ini memicu adanya perang saudara antara kelompok pro pemerintah dan kontra pemerintah. Selanjutnya, hal ini dimanfaatkan oleh aktor regional dan internasional untuk melakukan intervensi demi meraih kepentingan mereka beserta para aliannya.

Negara ini telah dilanda serangkaian masalah yang tampaknya sulit diselesaikan dalam beberapa tahun terakhir. Yaman memiliki populasi penduduk sekitar 24 juta dan tersebar di sekitar 135.000 desa dan komunitas, serta memiliki salah satu tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia, yaitu sekitar 3% per tahun. Populasi ini diperkirakan akan mencapai 60 juta penduduk pada tahun 2050, jika tingkat pertumbuhannya mengalami eskalasi yang signifikan. Pengangguran diperkirakan mencapai 40% dan 43% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan gender pun semakin meningkat, tingkat melek huruf untuk perempuan adalah 29% dibandingkan dengan 69% untuk laki-laki. Lebih dari 50% anak perempuan tidak menyelesaikan sekolah dasar dibandingkan dengan 18% anak laki-laki. Selain itu, menipisnya sumber daya minyak dan air juga menambah krisis yang terjadi di Yaman. Cadangan minyak di mana rezim sangat bergantung pada pemeliharaan jaringan patronase, subsidi dan pembayaran gaji pegawai negeri, dengan cepat menyusut dan bisa habis dalam satu dekade. Sementara itu, cadangan air negara juga menghadapi penyusutan, dan diperkirakan bahwa Sanaa bisa menjadi ibu kota pertama di dunia yang kehabisan air (Durac, 2012, p. 164).

Hal yang mendasari semua

destabilisasi ini adalah ketidakmampuan presiden Ali Abdullah Saleh untuk menghidupkan kembali ekonomi Yaman yang sekarat. Meskipun Bank Sentral Yaman (CBY) telah berhasil menjaga mata uang negara agak stabil, tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kerawanan pangan tetap meningkat secara signifikan, meskipun telah mendapat dukungan pembangunan dari negara-negara Uni Eropa dan lainnya. Ketakutan akan pembubaran Yaman di masa mendatang, memicu serangkaian kejadian pembicaraan yang didukung Barat dan dimediasi oleh Kerjasama Teluk Council (*GCC/ Gulf Cooperation Council*), serta disponsori oleh Group of 10 (G10), kelompok diplomatik yang terdiri dari negara-negara GCC, DK PBB anggota tetap, dan delegasi Uni Eropa ke Yaman. Penasihat Khusus PBB untuk Yaman, Jamal Benomar yang diangkat pada April 2011, memfasilitasi pembicaraan yang bertujuan untuk menengahi kesepakatan antara GPC (*General People's Congress*), Saleh dan JMP, dengan mengesampingkan kelompok oposisi lainnya, termasuk Houthi dan Gerakan Selatan (Baron, 2015, p. 2).

Meski tak menyertakan kubu oposisi, upaya mediasi tersebut akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 16 November 2014 dengan penandatanganan yang disebut kesepakatan GCC. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari GPC dan JMP di Riyadh. Adapun isi dari kesepakatan GCC adalah mengusulkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional di mana Presiden Ali Abdullah Saleh akan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Abdu Rabu Mansour Hadi, dan mengajukan permohonan pengunduran diri ke parlemen dalam waktu 30 hari. Setelah itu, dalam waktu 2 bulan akan digelar pemilihan presiden. Sebagai balasannya, Saleh dan para pejabat tingginya diberikan imunitas dari tuntutan hukum (Baron, 2015, p. 2).

Kegiatan sepihak yang dilakukan oleh Saleh dengan rekanannya tanpa melibatkan kelompok Houthi jelas mendapat reaksi keras dari mereka. Karena

merasa tak dilibatkan, akhirnya menimbulkan ketersinggungan bagi kelompok Houthi yang merupakan kelompok minoritas di Yaman. Hal ini tentu saja tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Sebaliknya, tindakan mediasi ini justru memperuncing ketegangan antara kubu pemerintah dengan oposisi. Ketidakterlibatan pihak oposisi pemerintah dalam perundingan tersebut tentu seolah mendiskreditkan mereka sehingga mereka dapat melakukan perlawanan.

Kepentingan Amerika Serikat dan Iran di Yaman

1. Kepentingan Pertahanan

Pertahanan merupakan aspek penting dalam perebutan pengaruh kekuasaan di dunia. Kepentingan terhadap pertahanan sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang memiliki pasukan militer yang kuat dan didukung dengan teknologi yang canggih. Maka dari itu, banyak negara-negara yang melakukan invasi, intervensi dan aliansi dengan negara lain untuk memperoleh kepentingan di bidang pertahanan. Seperti halnya AS dan Iran yang memanfaatkan konflik Yaman sebagai jalan guna mendapatkan apa yang menjadi kepentingan pertahanan keduanya.

Kepentingan pertahanan AS dalam konflik Yaman adalah membatasi pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah dan juga membatasi ambisi Iran untuk memperoleh teknologi nuklir militer dan mengembangkan kemampuan rudal jarak jauh. Selain itu, AS ingin mendestabilisasi Timur Tengah dengan memberlakukan sanksi keras terhadap Korps Pengawal Revolusi Iran (Al-Qadhi, 2017). Sikap AS ini didasari oleh kekhawatirannya bahwa dominasi dan peran AS akan semakin menyusut di kawasan Timur Tengah karena program nuklir Iran. Jika peran dan dominasi AS semakin menyusut, maka geopolitik kawasan Timur Tengah pun akan berubah, sehingga dominasi yang awalnya berada di tangan AS akan berpindah di tangan Iran (Grove, Kalin, & Said, 2021).

Adapun kepentingan pertahanan Iran dalam konflik di Yaman adalah Iran

ingin menghalangi, menyeimbangkan, dan melawan negara-negara kuat yang menimbulkan ancaman bagi keamanan dan kepentingan nasionalnya, salah satunya Amerika Serikat. Kedua, Iran harus mengejar tujuan itu sambil mencegah negara-negara lain yang ingin meruntuhkan pusat kekuasaannya. (Esfandiary & Tabatabai, p. 160). Untuk mendukung kepentingan pertahanan tersebut, Iran melakukan pengiriman bantuan dan senjata secara stabil dan berkelanjutan bagi kelompok-kelompok terafiliasi berupa senjata otomatis, baterai, senjata anti-tank dan uang tunai biasanya dikirimkan melalui laut (Mustofa, 2021).

Selain kepentingan Iran di atas, melalui konflik Yaman, Iran juga ingin memperluas lingkup pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Hal ini dikarenakan Yaman memiliki lokasi yang strategis dan bobot geopolitik yang berpengaruh di kawasan tersebut. Dengan meningkatkan pengaruh dan dominasinya di Yaman, Iran dapat membangun pijakan internasional yang strategis, sehingga dapat mengontrol lalu lintas di Teluk Aden dan Selat Mandab yang merupakan penghubung utama antara Teluk Arab dan Samudra Hindia di Laut Merah ke Terusan Suez dan dianggap sebagai jalur air utama minyak dunia (Al-Qadhi, 2017).

2. Kepentingan Ekonomi

Yaman memiliki sumber daya alam berupa tembaga, perak, kobalt, nikel, emas, batu pasir, batu kapur, gypsum, scoria, perlit dan masih banyak lainnya. Yaman juga memiliki kandungan bahan bakar fosil berupa gas alam dan minyak mentah. Kandungan minyak yang terdapat di Yaman diperkirakan mencapai 12 miliar barel. Amerika Serikat mempunyai kepentingan untuk menguasai dan mengontrol penuh sumber daya alam di Timur Tengah, khususnya di Yaman. Namun upaya AS tersebut terjejal oleh Iran dan mengakibatkan kekhawatiran bagi Gedung Putih (Mustofa, 2021). AS dan pemerintahan Yaman menggunakan AQAP untuk keuntungan ekonomi dan politik mereka sendiri. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi telah berfokus pada

memerangi Houthi dan Iran, sehingga akan memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka.

Intervensi militer AS melalui Arab Saudi dalam konflik Yaman juga didasari oleh keterlibatan Iran dalam memberikan bantuan-bantuan kepada pemberontak Houthi yang merupakan oposisi pemerintah Yaman. Ketika Iran memberikan bantuan ekonomi guna mendukung pergerakan Houthi melawan pemerintah Hadi, maka hal ini berdampak terhadap pengaruh kuat Iran di Yaman. Arab Saudi sebagai negara mitra Yaman dan memiliki hubungan ekonomi yang dekat melakukan intervensi militernya untuk mengamankan pengaruh ekonominya dari kerjasama yang telah lama dibangun dengan Yaman (Hakiki & Sari, 2022).

Namun, Iran juga merupakan pihak yang memiliki hubungan dekat dengan Houthi yang menjadi musuh Arab Saudi di Yaman. Kedekatan hubungan Iran-Houthi membuat Teheran tidak akan membiarkan partnernya berjuang sendirian demi sebuah kepentingan ekonomi dan sumber daya yang terdapat di Yaman. Karena kepentingan tersebut berfungsi untuk memperkuat posisi Iran agar lebih kokoh di Timur Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa Teheran menganggap konflik Yaman merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan pengaruh di negara yang terbelah dan merusak stabilitas Arab Saudi yang merupakan musuh utamanya di wilayah tersebut serta merusak dominasi Amerika Serikat yang berada di balik Saudi yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam di Yaman (Guzansky, 2012, p. 1).

3. Kepentingan Tatanan Dunia

Perang yang berkecamuk di Yaman bisa dikatakan sebagai kesempatan emas bagi AS dan Iran untuk menunjukkan eksistensinya dalam politik global. Adapun mitra utama AS di kawasan tersebut adalah Arab Saudi. AS memiliki istilah terkenal di internal mereka, yaitu *“The American Dream”* yang meliputi emas (*gold*), agama (*gospel*) dan kejayaan (*glory*). Penjabaran dari ketiga unsur tersebut adalah, pertama,

tujuan AS sebagai pendatang adalah mengejar kekayaan materi atau sumber daya alam. Kedua, upaya mereka dalam menyebarkan agama dan keyakinan atau ideologi yang belakangan ini dapat diartikan sebagai penyebaran asas demokrasi liberal. Ketiga, upaya mereka untuk meraih kejayaan atau dominasi. Paham tersebut menjadi faktor penting yang mendorong keberadaan AS di kawasan Timur Tengah (Sahide, 2019).

Adanya campur tangan Amerika Serikat -dengan bantuan partnernya, Arab Saudi- di kawasan Timur Tengah adalah untuk menciptakan pemerintah yang mampu membawa perdamaian, stabilitas, pemulihan dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui hal ini, AS akan semakin dekat dengan tujuannya di atas. Pada konflik di Yaman, AS mendukung Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam menggunakan kekuatan udara untuk memaksa konsesi Houthi-Iran yang menjadi penghambat terealisasinya tujuan AS di Timur Tengah (Cordesman, 2017, p. 14).

Selain mendukung Arab Saudi dan UEA, AS juga mendukung pemerintahan Yaman. Saleh sebagai presiden Yaman memosisikan dirinya sebagai partner Amerika Serikat dalam melawan terorisme. Kedekatan tersebut menyebabkan AS menyerahkan sejumlah besar kekuasaan ke rezim Saleh untuk memastikan kerja sama di masa depan. AS menghalangi potensi perubahan politik dan sosial dari atas dengan hanya berusaha menstabilkan rezim. Dengan demikian AS bisa memegang kendali atas rezim beserta aliansinya, terutama Arab Saudi (Perkins, 2016, p. 12).

Revolusi Yaman telah mendorong Iran untuk meningkatkan dukungan politik dan militernya terhadap elemen oposisi di pemerintahan Yaman, khususnya pemberontak Syiah Houthi. Dukungan Iran tidak berakhir hanya dengan Syiah. Iran juga mendukung elemen lain yang kontra dengan pemerintah Yaman. Tujuannya adalah untuk membuat pihak oposisi pemerintah Yaman menjadi lebih kuat, sehingga sulit bagi Saleh untuk memaksakan kewenangannya di berbagai

pelosok negara. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan Iran terhadap pemberontakan Syiah sebagai cara untuk meningkatkan pengaruh di negara yang terpecah dan merusak stabilitas AS di balik Arab Saudi yang menjadi musuh utamanya di wilayah tersebut (Guzansky, 2012, p. 1).

Konflik antara Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah menjadi ajang eksistensi Iran kepada Amerika Serikat. Iran memiliki dua keuntungan. Pertama, menguras keuangan Arab Saudi. Kedua, mempertahankan posisi Arab Saudi agar tetap sibuk di selatan. Dengan demikian, Iran bisa menghalangi keterlibatan Arab Saudi lebih jauh dalam perang Suriah, di mana Iran mencoba menopang rezim Assad yang sangat dibenci oleh Arab Saudi. Apalagi keuangan dan sumber daya material Iran yang terbatas, mengharuskannya fokus pada poros terdekatnya saja, yaitu Lebanon-Suriah-Irak. Karena itu, masuk akal bagi Iran untuk memproyeksikan tangannya di Yaman melalui retorika daripada mengalihkan sumber daya yang signifikan ke sana (Kendall, 2017, p. 4).

Selain menekan Arab Saudi, Iran juga ingin merusak klaim Arab Saudi sebagai *regional power* di Timur Tengah. Dengan merusak klaim tersebut, Iran ingin menunjukkan bahwa Teheran merupakan *regional power* sesungguhnya di Timur Tengah. Sedangkan terhadap AS, Iran ingin menyaingi dominasinya sebagai kekuatan besar di Timur Tengah melalui pengembangan kekuatan militer dan kebijakan pertahanan, seperti pengembangan teknologi nuklir yang menjadi basis kekuatan Iran (Irawan, 2021).

4. Kepentingan Ideologi

Kepentingan ideologi merupakan salah satu kepentingan yang tidak dapat terlepas dari kepentingan nasional suatu negara dalam hal kerja sama, pengaruh maupun kebijakan yang diambil oleh negara tersebut terhadap suatu negara lain. AS dan Iran memanfaatkan destabilisasi di Yaman untuk memperkuat kepentingan ideologi yang mereka inginkan.

Dalam merealisasikan kepentingan

ideologi tersebut, AS dan Iran lebih memilih untuk menggunakan aktor lain. AS beraliansi dengan Arab Saudi untuk membangun kekuatan di Yaman. AS dan Arab Saudi mendukung barisan pemerintahan Yaman dalam pembuatan setiap kebijakan. Elit politik Yaman memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi. Hal ini dikarenakan para elit mendukung AQAP (Al-Qaeda in Arabian Peninsula), jihadis Sunni, sebagai alat untuk memerangi Syiah Houthi yang tidak sejalan dengan pemerintahan Yaman. Hal itu tentunya menambah dimensi konflik lebih jauh antara AS dan Iran, yang mana Syiah Houthi merupakan afiliasi Iran (Johansson, 2020).

AS dan Arab Saudi tentu saja khawatir bahwa Syi'isme yang dianut oleh Iran juga memberikan pengaruh terhadap negara-negara di sekelilingnya, sehingga baik kepentingan AS dan Arab Saudi akan semakin sulit berkembang di Timur Tengah. Terlebih, setelah ideologi Sunni – ideologi utama di Arab Saudi- di Irak jatuh dan berganti menjadi Syiah seperti Iran. peristiwa tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi AS dan sekutunya. Di saat AS sedang kesulitan dan berusaha mencari cara untuk menguasai sumber daya alam di Timur Tengah, faktor ideologi juga menjadi hambatan bagi strategi-strategi AS untuk melebarkan sayap pengaruhnya. Hambatan tersebut tentu akan membuat kepentingan nasionalnya menjadi lumpuh dan bergeming (Mustofa, 2021).

Di sisi lain, Iran sebagai pendukung pemberontakan mayoritas Syiah di Bahrain, memicu intervensi militer di pihak Arab Saudi, UEA, dan negara Teluk lainnya di negara tetangga, di bawah bendera GCC. Iran terus mendukung pemerintah mayoritas Syiah dan milisi Syiah di Irak yang mana mereka berkonflik dengan Sunni. Hal ini juga termasuk dalam perjuangan Assad untuk bertahan hidup di Suriah, bersama dengan relawan Hizbullah dan Syiah dari Irak, Afghanistan, dan tempat lain. Di samping itu, Iran juga memanfaatkan kekuatan regional anti pemerintah, Houthi, untuk mengimbangi kekuatan Arab Saudi. Iran mendukung penuh Houthi selama bertahun-tahun

dengan persenjataan yang cukup lengkap, pelatihan, dan bantuan keuangan. Terlepas adanya kesamaan ideologi antara Iran-Houthi, Iran jelas memiliki rencana untuk mempertahankan eksistensi mereka di kawasan Timur Tengah. Semua ini mengarah pada situasi perang proksi di Yaman antara koalisi Sunni pimpinan Arab Saudi dan AS berhadapan dengan Syiah pimpinan koalisi Iran (Mustofa & Syarifah, 2021).

Analisis Perbandingan Kepentingan AS-Iran

Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Iran di Yaman memang menjadi arena pertarungan yang menarik. AS yang berusaha mendukung pemerintah Ali Abdullah Saleh melalui sekutunya Arab Saudi harus mengatur strategi untuk bisa meredam pemberontak. Di sisi lain, Iran memanfaatkan gabungan faksi-faksi pemberontak -Houthi- untuk meruntuhkan rezim Saleh. Rivalitas antar negara tersebut turut serta dalam memperkeruh konflik Yaman. Ketika revolusi membelah militer dan struktur kelembagaan, kendali pemerintah pusat atas negara dengan cepat terurai (Baron, 2015, p. 2). Koalisi AS-Arab Saudi dan Iran-Houthi saling memiliki kepentingan nasional dalam melancarkan intervensi pada konflik Yaman.

Amerika Serikat memiliki Arab Saudi sebagai aliansi utamanya di Timur Tengah. Dalam konflik Yaman, mereka berupaya kuat untuk menopang kubu pemerintah. Melalui Arab Saudi sebagai negara dengan klaim *regional power* di Timur Tengah, AS ingin melancarkan misinya sebagai negara yang punya dominasi dan pengaruh kuat di kawasan Timur Tengah (Terrill, 2011). Kepentingan nasional AS dalam konflik Yaman meliputi kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologis.

Kepentingan pertahanan AS yaitu mempertahankan eksistensi kekuatan dan dominasinya di Timur Tengah dengan cara membatasi Iran dalam mengembangkan teknologi militernya, terutama nuklir dan rudal jarak jauh. Karena jika hal ini terjadi, maka dominasi AS akan berkurang dan

Iran akan semakin menancapkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah yang mana akan sangat merugikan kepentingan AS. Sedangkan untuk kepentingan ekonomi, AS ingin menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh Yaman, karena hal ini sangat menguntungkan perekonomian AS.

Adapun kepentingan tatanan dunia AS adalah ingin menunjukkan eksistensinya dalam politik global, menjadi negara *super power* dan merealisasikan slogan mereka; *gold, gospel, dan glory* yang berarti mengejar materi, menyebar ideologi dan meraih kejayaan. Sedangkan untuk kepentingan ideologi adalah AS menggambarkan intervensi militernya di Yaman dengan menyebarkan ideologi aliansinya, yaitu Arab Saudi. Ideologi yang disebarkan adalah ideologi Sunni, sebagai perlawanan ideologi Syiah yang didukung oleh Iran.

Seperti halnya AS yang memiliki Arab Saudi sebagai aliansi untuk mendukung pemerintah Yaman, Iran juga memiliki Houthi sebagai aliansi dan pendukung utama yang menjadi kelompok oposisi pemerintah. Melalui konflik Yaman ini, Iran ingin mewujudkan kepentingan nasionalnya untuk menjadi negara adikuasa baru di kawasan tersebut (Ramadhan, 2019). Senada dengan AS yang memiliki empat kepentingan nasional, Iran juga memiliki keempat hal tersebut.

Kepentingan pertahanan Iran adalah untuk memperkuat keamanan nasionalnya, memperluas lingkup wilayahnya dan membangun pijakan internasional melalui intervensi Yaman. Hal ini dikarenakan Yaman memiliki geopolitik yang menguntungkan pertahanan Iran jika berhasil menguasainya. Sedangkan dalam kepentingan ekonomi, Iran memberi bantuan kepada Houthi untuk mempertahankan sumber daya alam di negara Yaman yang ingin dieksplotasi oleh AS. Melalui kepentingan ekonomi ini dapat memperkokoh posisi Iran di kawasan Timur Tengah.

Adapun untuk kepentingan tatanan dunia, Iran ingin menyaingi dominasi AS sebagai kekuatan besar di Timur Tengah di

balik Arab Saudi. Sebagai jalan awal untuk mewujudkan hal tersebut, Iran berusaha mengambil kedudukan dan status Arab Saudi sebagai negara *regional power* di Timur Tengah. Sedangkan untuk kepentingan ideologi, Iran mengintervensi konflik Yaman dengan menyebarkan ideologi Syiah yang merupakan ideologi Houthi sebagai aliannya.

Dari analisis perbandingan di atas, terlihat bahwa baik AS maupun Iran, keduanya ingin menunjukkan eksistensinya di politik global maupun di mata dunia melalui konflik yang terjadi di Yaman. AS ingin mempertahankan dominasi, kekuatan, pengaruh dan eksistensinya sebagai negara *super power*, sedangkan Iran ingin menggeser dan menggantikan posisi AS tersebut melalui kepentingan nasionalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, motif Amerika Serikat dan Iran beserta aliannya dalam melakukan intervensi di Yaman pasca *Arab Spring* adalah untuk melancarkan kepentingan nasional keduanya. Kepentingan nasional tersebut terdiri atas kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Kepentingan pertahanan AS adalah ingin mempertahankan dominasinya di Timur Tengah, sedangkan Iran ingin memperluas lingkup wilayahnya sehingga dapat menguntungkan pertahanannya. Adapun dalam kepentingan ekonomi, AS dan aliannya ingin menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam di Yaman, sedangkan Iran dan koalisinya ingin mempertahankan dan menjaga sumber daya tersebut agar tidak dieksploitasi oleh AS. Dalam kepentingan tatanan dunia, AS ingin menunjukkan eksistensinya sebagai negara *super power*, sedangkan Iran ingin menyaingi kekuatan besar AS tersebut dan mengambil status *regional power* yang diklaim Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Sedangkan untuk kepentingan ideologi, AS menyebarkan ideologi sunni yang dianut oleh Arab Saudi sebagai aliannya untuk melawan Iran yang menyebarkan kepentingan ideologi

Syiah yang dianut oleh Houthi sebagai sekutunya. Iran berupaya memperluas pengaruh ideologi tersebut di kawasan Timur Tengah guna memperkuat dominasi. Hal ini membuat AS dan Arab Saudi khawatir bahwa ideologi revolusioner tersebut dan kebijakan kepentingan Iran yang lain akan mempengaruhi negara-negara di Timur Tengah untuk mengikuti perjalanan revolusi Iran sehingga merusak dominasi AS dan Arab Saudi.

DAFTAR PUSTAKA

- ABM, M. A. (2013). *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Al-Qadhi, M. H. (2017). *The Iranian Role in Yemen and Its Implication on the Regional Security*. Kairo: AGCIS: Arabian Gulf Center for Iranian Studies.
- Al-Tamimi, A. A., & Venkatesha, U. (2021). The Main Factors of Yemeni Conflict: An Analysis. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 4(2), 1-14.
- Baron, A. (2015). Civil War In Yemen: Imminent and Avoidable. *Jurnal European Council on Foreign Relations*(130), 1-9.
- Basuki, A. R., & dkk. (2019). Perang Saudara di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif dan Prospek Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, IX(1), 8-24.
- Brom, S., & Guzansky, Y. (2015). The Conflict in Yemen: A Case Study of Iran's Limited Power. *Jurnal INSS Insight*, 16(747), 1-3.
- Cordesman, A. H. (2017). The War in Yemen: Hard Choices in a Hard War. *Jurnal Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, 1-16.
- Dermawan, R. (t.thn.). The National Interest Concept in A Globalised International System. *International Journal of International Relations*, 30-48.
- Durac, V. (2012). Yemen's Arab Spring: Democratic Opening or Regime Maintenance? *Mediterranean Politics*, 17(2), 161-178.
- Esfandiary, D., & Tabatabai, A. (t.thn.).

- Yemen: an Opportunity for Iran–Saudi Dialogue? *The Washington Quarterly*, 39(2), 155-174.
- Farras, A. N. (2020). Balance of Power Dalam Intervensi Arab Saudi Pada Konflik Yaman yang Terjadi Pasca Arab Spring. *Journal of International Relations*, 6(1), 144-155.
- Grove, T., Kalin, S., & Said, S. (2021). Fear of Iran, Shrinking U.S. Role in Middle East Push Rivals Together: Leaders of Israel and the United Arab Emirates Meet Amid Flurry of Diplomacy in Region. *The Wall Street Journal*, 1-8.
- Guzansky, Y. (2012). Yemen: Between Iran, al-Qaeda, and the West. *Jurnal INSS Insight*, 350(2), 1-3.
- Hakiki, F., & Sari, D. S. (2022). Kepentingan Nasional Arab Saudi dalam Kebijakan Intervensi Militer di Yaman terhadap Keterlibatan Iran. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1), 93-111.
- Irawan, D. (2021). Dinamika Keamanan Kawasan Timur Tengah dalam Persaingan Kekuatan Iran dan Amerika Serikat. *Jurnal Dauliyah*, 6(2), 221-248.
- Johansson, L. (2020). *The United States Involvement in Yemen: A Case Study with Rational and Humanitarian Reasoning of the Involvement, Influence, and its Objective*. Diambil kembali dari <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1522904/FULLTEXT01.pdf>
- Juneau, T. (2013). Yemen and the Arab Spring: Elite Struggles, State Collapse and Regional Security. *Orbis*, 57(3), 408–423.
- Kendall, E. (2017). Iran’s Fingerprints in Yemen Real or Imagined? *Atlantic Council*, 1-11.
- Kronenfeld, S., & Guzansky, Y. (2014). Yemen: A Mirror to the Future of the Arab Spring. *Military and Strategic Affairs*, 6(3), 79-99.
- Moehnilabib, & dkk. (1997). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang.
- Mustofa, A. Z. (2021). Analisis Kerja Sama Indonesia-Arab Saudi dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 5(2), 175-190.
- Mustofa, A. Z. (2021). *Perang Proksi Amerika Serikat dan Iran dalam Politik Global Pasca Arab Spring*. Yogyakarta: CV The Journal Publishing.
- Mustofa, A. Z., & Syarifah, N. (2021). Politik Ofensif Amerika Serikat terhadap Sikap Defensif Iran: Dari Proksi hingga Dominasi. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 118-139.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *Brit. J. International Studies*(2), 246-266.
- Perkins, B. M. (2016). Yemen: Between Revolution and Regression. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1-39.
- Ramadhan, R. (2019). The Role of Iran in Yemen Conflict 2014-2018 (An Analysis Of Constructivism). *ICSGS: International Conference on Strategic and Global Studies* (hal. 1-11). Jakarta: European Union Digital Library.
- Rofii, M. S. (2019). Dinamika Pasca Arab Spring: Membaca Pola “Proxy War” di Suriah dan kawasan Timur Tengah. *Jurnal Dinamika Global*, 4(2), 283-302.
- Sahide, A. (2019). *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- studies.aljazeera.net. (2017). The Death of a Dictator: Yemen’s Miasma after Saleh. *AlJazeera Centre for Studies*, 1-8.
- Terrill, W. A. (2011). *The Conflict in Yemen and U.S. National Security*. Strategic Studies Institute, US Army War College.

